

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016 . Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Prenadamedia Group, Jakarta
- Ilyas, Amir, Haeranah, Azisa, Nur, Kaisaruddin dan Jurdi, Fajlurrahman 2012, Asas-Asas Hukum Pidana II, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kanter, E Y dan Sianturi, S.R., 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Mappiase, Syarif, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, PT Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Nawawi, Bardi, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, Kode Etik Hakim, PT Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana Cet 4, Rajawali Pers, Jakarta.

Prinst Darwan , 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salam, Moch.Faisal, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2002, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, S.R., 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHAEM-PETHAEM, Jakarta.

Sofyan, Andi, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.

Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2014, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek van Strafrecht (WvS).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Skripsi, Tesis, Jurnal

Al'anam, Muklis, 2025, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", Jurnal, Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Andianto, 2022, "Reformulasi Tindak Pidana Desersi Dalam Mendukung Operasi Militer Selain Perang", Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

A, Felia Primadana, 2023, "Penjatuhan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta", Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hairi, Prianter Jaya, 2018. "Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal, Badan Keahlian DPR RI.

- Herdjito, 2008, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi dan Dampaknya Terhadap Penegakkan Hukum TNI (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Julyano, Mario, Sulistyawan, Aditya Yuli, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kafi, Muhammad Izzu, Soehartono 2024, “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Terhadap Perkara Desersi”, Jurnal, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Daeng, Yusuf, Johar, Olivia Anggie, 2022, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, Nabahan, Roida, 2018, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)", Jurnal, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- Pratiwi, Ajeng Putri, 2016, "Peranan Jepang dalam Pembentukan Tentara PETA sebagai Cikal Bakal TNI = Japans Role in The Formation of PETA as The Forerunner of Indonesian National Army", Makalah dan Kertas Kerja, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2014, "Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)", Hasil Penelitian, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Rivannie, Syarif Saddam, Muchtar, Syamsudin, Muin, Audyna Mayasari, Prasetya, A.M. Djaelani, Rizky, Ali, 2022, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Tim Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)", Hasil Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Triadi, 2025, "Perkembangan Kesalahan Dan Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pandangan Hukum Pidana Formil)", Jurnal, , Ensiklopedia Social Review.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 127-K / PM II-11/ AD/XI /2011.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 76-K/PM II-11/AD/IX/2012.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 88-K/PM II-11/AU/IX/2012.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 02-K/PM II-10/AD/I/2013.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 232-K/PM II-08/AU/VIII/2022.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM II-08/AD/IV/2024.

E. Internet

Agustin L. Hutabarat, 2014. "Seluk Beluk Residivis", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/>, diakses pada 22 September 2025.

Bagus Raditya Wiradana, 2025. "Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>, diakses pada 23 November 2025.

Dewantoro, 2025. "Pedoman Pemidanaan, Ikhtiar Penegakan Hukum Pidana Berkeadilan dan Humanis", <https://dandapala.com/opini/detail/pedoman-pemidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis>, diakses pada 23 November 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025. "Desersi", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=desersi&t_put=2025, diakses pada 22 September 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025. “Pengulangan Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pengulangan%20desersi%20dalam%20waktu%20damai%22>, diakses pada 29 September 2025.

Nafiatul Munawaroh, 2024, “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 24 November 2025.

— Munawaroh, 2024, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straaf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>, diakses pada 24 November 2025.

Markas Besar Angkatan Darat Dinas Psikologi, 2025. “Sapta Marga”, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/sapta-marga>, diakses pada 24 November 2025.

— Besar Angkatan Darat Dinas Psikologi, 2025, “Sumpah Prajurit”, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/sumpah-prajurit>, diakses pada 24 November 2025.

Pusat Penerangan TNI, 2014. “Dankodiklat TNI : Nilai-Nilai Kehidupan Prajurit Harus Dilandasi Dengan Jiwa Sapta Marga”, <https://tni.mil.id/view-199437-dankodiklat-tni-nilai-nilai-kehidupan-prajurit-harus-dilandasi-dengan-jiwa-sapta-marga.html/>, diakses pada 7 Oktober 2025.

Rifqi S Assegaf, 2016, “Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam RKHUP”, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-RKUHP-terkait-Pedoman-Pemidanaan-20161207.pdf>, diakses pada 23 November 2025.

Teddy Lesmana, 2021, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 23 November 2025.

Tim Hukumonline, 2024, “Pengertian, Tujuan, dan Sifat-Sifat Norma Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-norma-hukum-lt66143f420f4f9/>, diakses pada 23 November 2025.

Tim Hukumonline, 2024, “Tahapan dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidana-lt65eacd30c87bc/?page=2>, diakses pada 23 November 2025.

Willa Wahyuni, 2022, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, diakses pada 23 November 2025.